

BURSA & FINANSIAL

PERBANKAN

Asuransi Syariah Diminta Hindari Persoalan Gagal Bayar

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta industri asuransi berbasis syariah harus dapat menghindari persoalan gagal bayar klaim asuransi milik nasabah karena salah dalam pengelolaan investasi perusahaan.

Untuk menghindari kegagalan dalam memberikan klaim nasabah asuransi tersebut, Ma'ruf mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik atau good corporate governance dalam industri asuransi syariah.

"Penerapan aspek good corporate governance yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi, seperti kasus gagal bayar pada perusahaan asuransi," kata Wapres saat memberikan sambutan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Jakarta, Selasa (30/6).

Penerapan tata kelola usaha yang baik, lanjut Wapres, juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen asuransi syariah.

Selain itu industri asuransi syariah harus dapat mencari potensi yang selama ini belum disediakan, sehingga pertumbuhan asuransi syariah dapat meningkat dan semakin dikenal masyarakat.

"Industri asuransi syariah harus lebih banyak meningkatkan inovasi-inovasi produknya untuk meningkatkan inklusi dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah," tambahnya.

Untuk menjadikan asuransi syariah menjadi inklusi, Ma'ruf meminta industri jasa keuangan syariah itu menggalakkan strategi pemasaran supaya kesadaran masyarakat terhadap produk tersebut meningkat. "Eksposur industri syariah perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan awareness terhadap produk dan industri asuransi syariah," ujarnya.

Dengan strategi tersebut, Ma'ruf berharap industri keuangan syariah dapat bertahan dan berkembang di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin Noekman mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih belum bisa memproyeksi kinerja syariah sampai akhir tahun nanti.

"Memang saat ini asuransi syariah sedang mengalami rapor merah, namun hal itu tidak terlalu parah, karena fondasi aset bertumpu pada instrumen yang aman seperti deposito dan sukuk sehingga tidak begitu terkejut," ujarnya.

Lanjut ia, pada kuartal-1 2020 adapun klaim asuransi syariah mencapai Rp 4,14 triliun. Erwin bilang, angka itu naik 4,31% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp 3,84 triliun. Tak hanya itu, aset industri juga mengalami penurunan. Tercatat, pada Maret 2020 total aset mencapai Rp 41,12 triliun. Padahal, di periode yang sama tahun sebelumnya aset industri mencapai Rp 43,40 triliun. ● **bari**

BNI Syariah Mulai Pasarkan Produk KPR Subsidi Syariah

NERACA

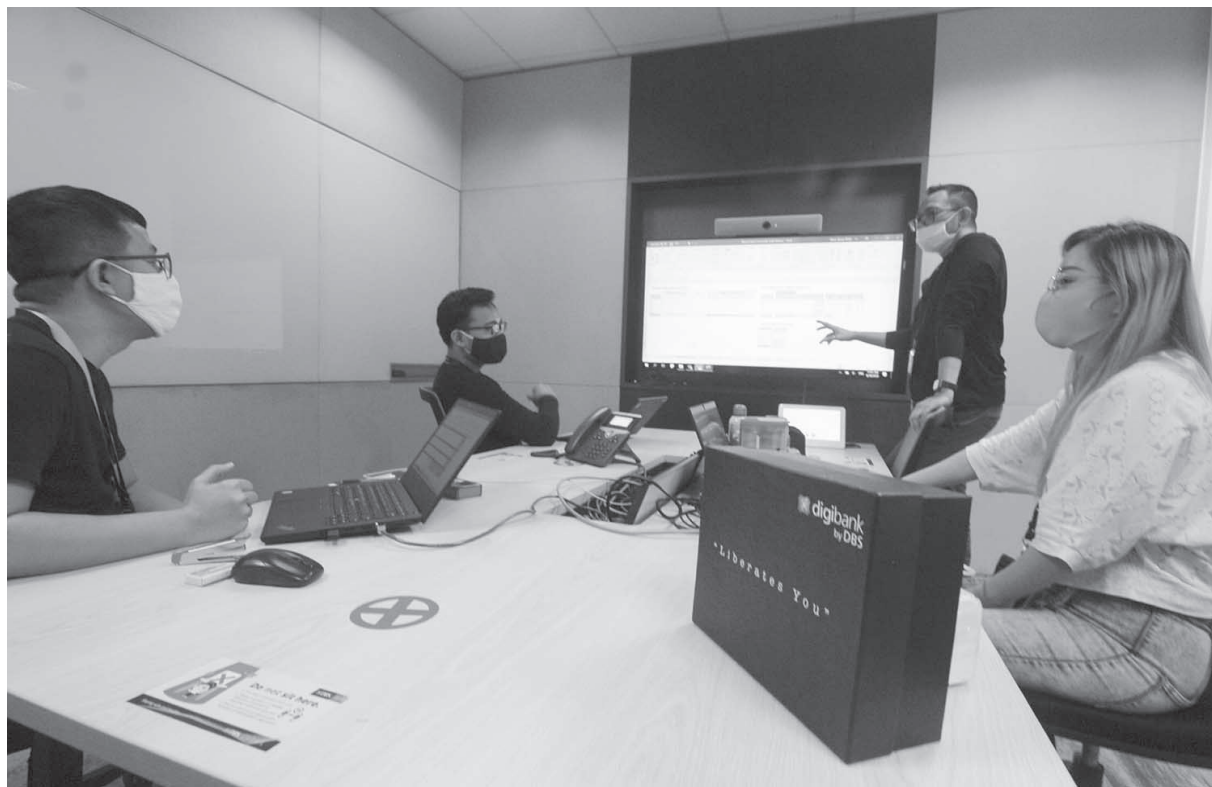
Jakarta - BNI Syariah mulai memasarkan KPR Subsidi Syariah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan produk KPR Sejahtera Syariah, setelah resmi ditunjuk sebagai bank penyalur KPR Syariah FLPP tahun 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Bisnis Ritel & Jaringan BNI Syariah Iwan Abdimengatakan, penyaluran pembiayaan rumah subsidi merupakan wujud komitmen bank dalam menyelesaikan Program Satu Juta Rumah yang dikelola melalui Kementerian PUPR. "Hal ini sejalan dengan maqashid syariah sebagai bentuk dukungan BNI Syariah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat memiliki rumah idaman sesuai prinsip syariah," ujar Iwan dalam keterangan di Jakarta, Selasa (30/6).

Melalui KPR Sejahtera Syariah, diharapkan BNI Syariah bisa memberikan solusi kepada MBR yang belum memiliki rumah dengan memberikan fasilitas pembiayaan pemilihan rumah dengan angsuran terjangkau.

Keunggulan nasabah yang membeli rumah subsidi di BNI Syariah adalah adanya prinsip 5B atau Lima Bebas, yaitu nasabah bebas administrasi untuk akad murabahah, bebas provisi, bebas appraisal, bebas finalti, dan bebas gharar.

Selain kelebihan lainnya berupa perasaan tenang dan tenang karena sesuai prinsip syariah, angsuran ringan sampai lunas, proses persetujuan pembiayaan mudah dan relatif cepat, subsidi bantuan uang muka dari pemerintah. ● **bari**



NERACA/Widi Suparwedi

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN BANK DBS INDONESIA** : Sejumlah karyawan Bank DBS Indonesia melakukan rapat membahas program perusahaan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak tempat duduk, di area kantor DBS Tower, Jakarta, Selasa (30/06/2020). Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan praktik bisnis dan perbankan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, Bank DBS Indonesia turut menerapkan protokol kesehatan dan penyesuaian operasional untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada masa transisi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemerintah Diminta Hati-Hati Tempatkan Uang Negara di Perbankan

Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati menempatkan uang negara di perbankan mengingat penyaluran kredit oleh lembaga keuangan itu tidak bisa dipaksakan.

NERACA

"Menurut saya pemerintah harus hati-hati dalam memberikan dana kepada bank Himbara atau pun swasta yang sebenarnya tidak bisa dipaksakan untuk memberikan kredit," katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (30/6).

Aviliani mengatakan pemerintah tidak bisa memaksakan perbankan untuk menyalurkan kredit saat Indonesia masih berada dalam kondisi yang penuh ketidakpastian akibat COVID-19 seperti ini. "Bank itu menciptakan supply side jadi tidak bisa dipaksakan

ing loan/NPL) yang meningkat signifikan. "Kalau memaksakan kredit tapi tidak ada demand nya maka itu malah jadi kredit macet. Kecuali ada potensi banyak tapi uangnya enggak ada itu boleh," ujarnya.

Ia menjelaskan tanpa pemerintah menempatkan dana Rp30 triliun, perbankan sudah menyalurkan kredit yang bergantung pada permintaan yakni terbukti pertumbuhan kredit pada Maret sebesar 8 persen dan April sebesar 5 persen. "Jadi kalau menurut saya harus hati-hati juga karena dengan diberikan dana dan dipaksa agar kredit tumbuh menurut saya itu belum tentu dibutuhkan," katanya.

Aviliani pun memutar jika penyaluran kredit tetap dipaksakan sedangkan permintaan tidak ada maka akan menimbulkan risiko yaitu rasio kredit bermasalah (non perform-

malkan penyerapan anggaran kesehatan.

"Itu menciptakan demand karena begitu dia membayar dari anggaran kesehatan maka dia dapat di farmasinya dan lain-lain. Ditahannya uang pemerintah itu tidak di spending itu, mempengaruhi ekonomi," katanya.

Ia menyatakan realisasi penyerapan anggaran seperti untuk kesehatan, UMKM, insentif dunia usaha, sektoral dan pmda, serta perlindungan sosial yang rata-rata masih di bawah 5 persen akan menahan pergerakan ekonomi.

"Realisasi anggaran itu akan menggerakkan ekonomi. Menurut saya belanja pemerintah daerah dan pusat ini lah yang harus dipercepat sehingga itu akan menciptakan demand side sehingga otomatis supply side akan jalan," katanya.

● **bari**

Dapat Tambahan Likuiditas, Bank Mandiri Leluasa Salurkan Kredit

NERACA

Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk makin leluasa menyalurkan kredit untuk mendorong bergakarnya kembali roda perekonomian domestik usai mendapat tambahan likuiditas Rp10 triliun dari pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rully Setiawan mengatakan di Jakarta, Selasa (30/6), selama ini Bank Mandiri selalu menjaga tingkat likuiditas

dalam level yang aman guna memenuhi kewajiban jatuh tempo dan kebutuhan operasional bank, baik untuk penarikan tunai maupun pencairan kredit, termasuk ketika masa pandemi.

"Termasuk dalam masa pandemi COVID-19 sebelum adanya penempatan dana pemerintah tersebut, semua kebutuhan likuiditas masih dapat terpenuhi. Dengan adanya penempatan dana pemerintah ini, menambah keluasaan

Bank Mandiri," ujar Rully. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI Senin (29/6) menyebutkan, Bank Mandiri akan memberikan kredit untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif atau sektor riil, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional dengan total penyaluran Rp21 triliun selama tiga bulan. Rinciannya yaitu untuk

segmen mikro, Kredit Usaha Mikro (KUM), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp6 triliun dengan target sekitar 72 ribu debitur akan fokus di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa produksi, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata dan sektor lain yang mendukung ketahanan pangan. Sedangkan untuk segmen mikro dan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dengan target 15 ribu debitur senilai Rp1 triliun. ● **bari**

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan keputusan RUPST tg 26 Juni 2020 yg dimuat dim akta no.04 tg 29 Juni 2020 dihadapan Dahang Hernawan SH, MKn notaris di Kota Cimahi, telah dilakukan Pembubaran PT. Anugrah Mandala Sakti berkedudukan di Kab. Bogor (perseroan).  
Segala kebebasan/ pengalihan dan tagihan thd perseroan dpt diajukan kpd. Tn Manaf Cipto sbg likuidator di; perum Nanggewer Indah II. Cempaka no.16 Cibinong Kab Bogor; dlrm jkt wkt 60 hari sejak Pengumuman ini.  
Demikian Pengumuman ini dibuat utk memenuhi ketentuan ps 147 (1) UU No.40/2007 ttg Perseroan Terbatas.  
Kab Bogor 29 Juni 2020  
Manaf Cipto  
Likuidator

**GOOD YEAR**  
RALAT KILAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIAMANDIEMEN DAN DISAJIKAN KEMBALI PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk, 31 DESEMBER 2019  
Mengikuti iklan pengumuman Laporan Keuangan yang Diamandiem dan Disajikan Kembali PT Goodyear Indonesia, Tbk 31 Desember 2019 tanggal 30 Juni 2020 di Harian Ekonomi Neraca terdapat kesalahan informasi di Laporan Posisi Anggaran Dasar Perseroan, Pengamngilan RUPST akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan situs web Perseroan www.adindoforesta.com, pada tanggal 17 Juli 2020.  
Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah:  
i. Untuk saham-saham Perseroan hanya/ah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB; dan  
ii. Untuk saham-saham Perseroan hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.  
Segai dengan pasal 12 POJK No. 32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni 10 Juli 2020 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.  
Jakarta, 1 Juli 2020  
PT Goodyear Indonesia, Tbk,  
Direksi

**PENGUMUMAN**  
Dengan ini PT. GELORA CIPTA PERSADA, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan telah melakukan pengambilalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, oleh Investor baru secara langsung dari Pemegang Saham Perseroan.  
Jakarta Selatan, 1 Juli 2020  
PT. Gelora Cipta Persada  
Direksi

**PENGUMUMAN**  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini PT. AMAAN INDONESIA SEJAHTERA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), mengumumkan rencana pengalihan sebagian besar saham milik JOHNNY NG dalam Perseroan kepada PT KATALIS DIGITAL NUSANTARA, sehingga akan terjadi perubahan pengendali dalam Perseroan ("Pengambilalihan").  
Bagi kreditur atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang keberatannya atas rencana Pengambilalihan tersebut dapat mengajukan keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.  
Jakarta, 1 Juli 2020  
Direksi PT. AMAAN INDONESIA SEJAHTERA  
Jalan Cikini Raya Nomor 9, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

**PENGUMUMAN**  
Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 7, tanggal 27 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang pemberitaannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01-03-0239349, tanggal 8 Juni 2020, Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), dimana penyerotan atas peningkatan modal tersebut sebesar Rp. 930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah) dilakukan oleh BAMBANG SETIAWAN, seorang Warga Negara Indonesia dengan cara mengkonversi piutanganya kepada Perseroan menjadi setoran saham dalam Perseroan.  
Jakarta, 1 Juli 2020  
PT JAYA SELARAS BERKAH UTAMA

**PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II**  
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II.  
Pembubaran REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II wajib dilakukan sehubungan dengan telah terpenuhinya kondisi sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf (a) Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Kebijakan Pembubaran Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluksi Akibat Pandemi Covid-19, yang menyatakan bahwa REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II wajib dibubarkan apabila sejak pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 130 (seratus tiga puluh) Hari Bursa.  
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:  
1. Pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini, Manajer Investasi telah menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II kepada OJK melalui Surat Direksi PT Valbury Capital Management nomor 093/DIR-VCMM/VI/2020  
2. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatangani akta pembubaran REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET II di hadapan Notaris.  
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.  
Jakarta, 01 Juli 2020  
Manajer Investasi selaku likuidator  
PT Valbury Capital Management

**PT ADINDO FORESTA INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN")**  
**PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
Bersama ini direksi PT Adindo Foresta Indonesia Tbk., mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 ("RUPST"), akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020.  
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pengamngilan RUPST akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan situs web Perseroan www.adindoforesta.com, pada tanggal 17 Juli 2020.  
Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah:  
i. Untuk saham-saham Perseroan hanya/ah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB; dan  
ii. Untuk saham-saham Perseroan hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini.  
Segai dengan pasal 12 POJK No. 32, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni 10 Juli 2020 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.  
Jakarta, 01 Juli 2020  
PT Adindo Foresta Indonesia Tbk  
Direksi

**PANCA GLOBAL KAPITAL**  
**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PANCA GLOBAL KAPITAL TBK**  
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Nomor 15/POJK.02/2020 (POJK 15/2020), pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2020 paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.  
Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan Rapat.  
**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**  
Mengingat status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit virus Corona (Covid-19) dan POJK Nomor 15/POJK.02/2020, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada PT Ficomindo Buana Registrar Biro Administrasi Efek Perseroan melalui ("e-ASY.KSEI").  
Jakarta, 1 Juli 2020  
Direksi  
PT Panca Global Kapital Tbk

**Pratama Abadi Nusa Industri**  
**PT.PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk ("Perseroan")**  
**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2020.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 15/2020, pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2020 paling sedikit melalui satu Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.  
Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.  
**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**  
Mengingat status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit virus Corona (Covid-19) dan POJK Nomor 15/POJK.02/2020, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada PT Adimitra Jasa Korpora Biro Administrasi Efek Perseroan melalui ("e-ASY.KSEI").  
Tangerang, 01 Juli 2020  
Direksi  
PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk